

# *E-Government* Pelayanan Administrasi Persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut

Imas Sumiati, Zidan Kusmayanto\*

Universitas Pasundan

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Government dalam pelayanan administrasi persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh tuntutan reformasi birokrasi dan perkembangan teknologi informasi yang menuntut adanya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa ditemukan 2 tema meliputi: Kapasitas SDM dan Transformasi Digital, 11 kategori meliputi: Dukungan pimpinan, kebijakan SOP, pengelolaan e-government, kualitas pegawai, literasi digital pegawai, lingkungan kerja digital, digital persidangan, kondisi infrastruktur, dokumen dan informasi, manfaat e-government, adaptasi teknologi dan 75 code dalam E-government Pelayanan Administrasi Persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pendekatan fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini meliputi : Sekretaris, Kasubag Hukum dan Persidangan, Staff Bagian Hukum dan Persidangan, serta Anggota Dewan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif (Miles dan Huberman) yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat bantu Software Atlas.ti versi 9.

**Kata Kunci:** *E-Government*, Pelayanan, Administrasi Persidangan, Teknologi Informasi, Digitalisasi Pelayanan Publik

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.338>

\*Correspondence: Zidan Kusmyanto

Email:

[zidankusmayanto14@gmail.com](mailto:zidankusmayanto14@gmail.com)

Received: 30-06-2025

Accepted: 30-07-2025

Published: 30-08-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the implementation of E-Government in court administration services in the Legal and Trial Section of the Garut Regency DPRD Secretariat. The background of this study is based on the demands of bureaucratic reform and the development of information technology that demand more effective, efficient, transparent, and accountable public services. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study found that 2 themes were found including: Human Resource Capacity and Digital Transformation, 11 categories including: Leadership support, SOP policies, e-government management, employee quality, employee digital literacy, digital work environment, digital trials, infrastructure conditions, documents and information, e-government benefits, technology adaptation and 75 codes in E government Trial Administration Services in the Legal and Trial Section of the Garut Regency DPRD Secretariat. The research method used in this study is a phenomenological approach with a qualitative approach. In this study, data collection techniques were carried out through interviews, observations, documentation and literature studies. Informants in this study include: Secretary, Head of the Legal and Trial Sub-Section, Legal and Trial Staff, and Council Members. Data analysis used in this study is an interactive model data analysis (Miles and Huberman) which consists of several components, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusions or verification. Data analysis was carried out using Atlas.ti software version 9.

**Keywords:** *E-Government*, Court Administration Services, Information Technology, Digitalization of Public Services

## **Pendahuluan**

E-Government di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut memiliki permasalahan Permasalahan utama yang muncul yaitu belum optimalnya implementasi sistem digital dalam keseluruhan proses administrasi persidangan. Sebagian aktivitas, seperti pengelolaan dokumen, penjadwalan, dan pengarsipan, memang telah memanfaatkan teknologi informasi. Akan tetapi, beberapa proses masih dilakukan secara manual karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum berjalan secara menyeluruh dan terpadu. Permasalahan utama yang muncul di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut adalah belum optimalnya implementasi sistem digital dalam keseluruhan proses administrasi persidangan. Sebagian aktivitas, seperti pengelolaan dokumen, penjadwalan, dan pengarsipan, memang telah memanfaatkan teknologi informasi (Rahyaputra, 2021).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, khususnya di Bagian Hukum dan Persidangan, memiliki peran penting dalam mendukung kinerja lembaga legislatif daerah. Bagian ini bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi persidangan DPRD, mulai dari penyusunan jadwal rapat, distribusi undangan, penyusunan notulen, hingga dokumentasi hasil keputusan sidang. Seluruh aktivitas tersebut menuntut ketepatan waktu, koordinasi antarpihak, dan ketelitian dalam pengelolaan dokumen yang memiliki nilai hukum. Bagian ini bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi persidangan DPRD, mulai dari penyusunan jadwal rapat, distribusi undangan, penyusunan notulen, hingga dokumentasi hasil keputusan sidang (Diskominfo Bandung, 2017). Dalam praktiknya, proses administrasi persidangan selama ini masih banyak dilakukan secara manual, seperti pengiriman undangan fisik, pencatatan hasil rapat dalam bentuk dokumen kertas, dan penyimpanan arsip secara konvensional. Meskipun sistem digital mulai diterapkan melalui aplikasi persidangan daring, penerapannya belum sepenuhnya menyeluruh. Beberapa pegawai masih menghadapi kesulitan dalam penggunaan aplikasi, baik karena keterbatasan pemahaman teknologi maupun karena fasilitas pendukung, seperti perangkat kerja, yang belum sepenuhnya mendukung, mencerminkan adanya kesenjangan kapasitas SDM yang menjadi hambatan umum e-government di Indonesia (Shkarlet et al, 2020).

Dalam konteks pelayanan administrasi persidangan, penerapan e-government menjadi sangat penting terutama di lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan dan pembuatan keputusan melalui mekanisme persidangan (Dwiyanto, 2022). Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut merupakan unit yang bertanggung jawab mengelola administrasi pelaksanaan persidangan sebagai bagian integral dari tugas DPRD. Namun, pelaksanaan administrasi persidangan yang bersifat manual dan konvensional seringkali menghadirkan tantangan berupa proses yang lambat, rawan kesalahan administrasi, dan keterbatasan akses informasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, khususnya Bagian Hukum dan Persidangan, memiliki tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan persidangan, mulai dari penjadwalan, distribusi undangan, penyusunan risalah, hingga penyampaian hasil persidangan. Sebelum adanya digitalisasi, proses pelayanan administrasi persidangan masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan distribusi dokumen, rendahnya akses informasi, dan keterbatasan efisiensi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi E-Government dalam pelayanan administrasi persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, faktor penghambat dan pendukung, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.

### **Metodologi**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk menggali secara mendalam pengalaman subjek penelitian terkait E-Government Pelayanan Administrasi Persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.

Data dikumpulkan melalui empat teknik terpadu: Studi Kepustakaan (telaah literatur dan regulasi), Observasi (pengamatan langsung proses kerja), Wawancara Mendalam (percakapan dengan informan kunci menggunakan pedoman dan alat perekam), serta Dokumentasi (analisis dokumen dan arsip terkait).

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling, yakni pemilihan narasumber yang paling memahami fenomena, terdiri dari empat individu dengan peran strategis: Plt Sekretaris DPRD, Kasubag Hukum dan Persidangan, Staf Pelaksana, dan Anggota DPRD.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles dan Huberman, melalui tahapan Reduksi Data (penyederhanaan data dengan memo dan transkrip), Penyajian Data (koding dan kategorisasi data dalam bentuk naratif), dan Penarikan Kesimpulan (perumusan temuan baru). Keabsahan data diuji melalui Triangulasi (sumber, teknik, dan waktu) untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

### Hasil dan Pembahasan

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan Software Atlas T.I melalui beberapa tahapan yaitu coding, menentukan kategori, dan menentukan tema peneliti mengelompokkan hasil riset ini menjadi 2 thema 11 kategori dan 75 code dalam E-Goverment Pelayanan Administrasi Persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. Kategori yang diperoleh diantaranya meliputi, Dukungan pimpinan, kebijakan SOP, pengelolaan e-governmnet, Kualitas Pegawai, digital persidangan, kondisi insfrastruktur, dokumen dan informasi serta manfaat e-government. Thema yang ditemukan antara lain adalah Kapasitas SDM dan Transformasi Digital. Thema yang ditemukan antara lain meliputi :

- 1) Kapasitas SDM
- 2) Transformasi Digita

#### 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia



**Gambar 1.** *Thema* Kapasitas Sumber Daya Manusia

*Thema* pertama adalah Kapasitas SDM, Nurnawati (2021) menegaskan bahwa kesiapan dan kompetensi aparatur pemerintahan, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi, sangat menentukan keberhasilan implementasi e-government di berbagai instansi pemerintahan. Tema kapasitas SDM terdiri dari lima kategori yang meliputi: Dukungan Pimpinan, Kebijakan SOP, Pengelolaan E-Government, Kualitas Pegawai, Literasi Digital Pegawai dan Lingkungan Kerja Digital.

Kapasitas SDM merupakan faktor fundamental dalam menentukan keberhasilan e-government, sebagaimana ditegaskan oleh Nurnawati (2021) yang menekankan pentingnya kompetensi aparatur dalam penguasaan teknologi. Analisis ini dibagi menjadi enam aspek kunci, dimulai dari Dukungan Pimpinan yang merupakan faktor krusial. Pimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut telah memberikan dukungan moral dan motivasi nyata untuk mendorong digitalisasi administrasi persidangan demi efisiensi dan kecepatan. Bahkan, pimpinan membuka ruang untuk usulan inovatif seperti perekaman otomatis hasil rapat. Namun, dukungan ini masih berada pada tahap inisiasi dan belum diiringi dengan dikeluarkannya Kebijakan SOP khusus untuk digitalisasi secara formal. Walaupun kerangka kerja administratif secara manual sudah berjalan baik, kebutuhan akan SOP yang mengatur layanan digitalisasi secara lengkap dan sistematis masih menjadi fokus pengembangan karena belum semua bagian menggunakan layanan digital secara menyeluruh.

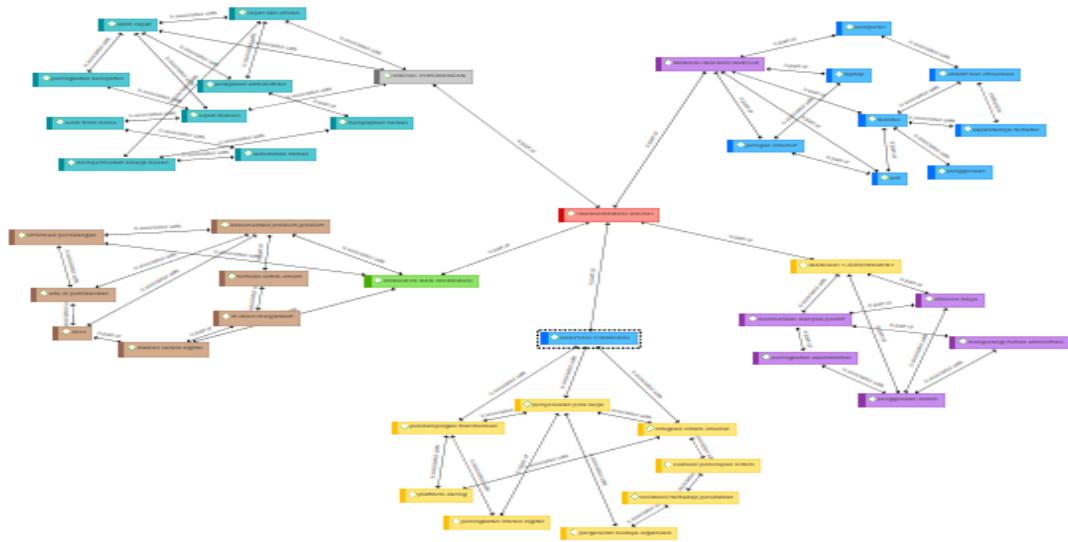
Dalam hal Pengelolaan E-Government, kondisinya belum berjalan secara maksimal dan masih dalam tahap pengembangan. Banyak pekerjaan di Sekretariat DPRD yang masih dilakukan secara manual, dan sistem digital yang ada belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini secara signifikan menghambat efektivitas layanan administrasi persidangan, sehingga memerlukan upaya pengembangan layanan yang lebih terpadu.

Mengenai Kualitas Pegawai, meskipun sebagian pegawai di Bagian Hukum dan Persidangan telah menerima pelatihan bimbingan teknis (bimtek), pelatihan tersebut masih bersifat dasar dan belum merata ke seluruh pegawai. Ini menandakan perlunya peningkatan kapasitas SDM yang lebih luas. Berbanding terbalik dengan keterbatasan pelatihan formal, Literasi Digital Pegawai menunjukkan adaptasi yang positif. Para pegawai menunjukkan kemandirian dengan aktif memanfaatkan sumber belajar daring, melakukan eksperimen dengan sistem yang tersedia, dan menunjukkan inisiatif dalam pembelajaran teknologi.

Terakhir, Lingkungan Kerja Digital di Sekretariat DPRD mulai bertransformasi, didukung oleh budaya kerja inovatif yang mendorong pemanfaatan sistem digital untuk percepatan administrasi. Hal ini terwujud melalui adanya ruang digital kolaboratif dan

platform berbagi dokumen. Meskipun dokumentasi dapat diakses secara digital, lingkungan kerja ini belum sepenuhnya digital dan terpadu secara menyeluruh, di mana pemerataan sistem digital masih perlu diintensifkan. Secara ringkas, meskipun didukung oleh pimpinan dan inisiatif individu, implementasi e-government terhambat oleh masalah integrasi sistem dan ketiadaan kerangka kebijakan (SOP) formal.

## 2. Transformasi Digital



Gambar 2. *Thema* Transformasi Digital

*Thema* kedua adalah Tranformasi Digital. Transformasi digital di Sekretariat DPRD berfokus pada peningkatan transparansi dan aksesibilitas dokumen serta informasi persidangan. Tema Transformasi Digital terdiri dari lima kategori yang meliputi: Digital persidangan, kondisi infrastruktur, dokumen informasi, manfaat e-governmnet, dan adaptasi Teknologi.

Konsep Digital Persidangan adalah implementasi proses persidangan yang didukung oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kelancaran administrasi. Di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut, digital persidangan belum sepenuhnya diterapkan karena masih ada keperluan untuk prosedur manual dan bukti fisik resmi. Meski demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Garut terus berupaya meningkatkan sistem digital persidangan ke tahap pengembangan yang lebih baik. Kondisi Infrastruktur TIK—yang mencakup hardware, software, dan jaringan—sudah memiliki perangkat komputer dan

jaringan internet untuk menunjang digitalisasi administrasi. Namun, ketersediaan perangkat keras belum sepenuhnya memadai, di mana beberapa meja kerja belum memiliki komputer individual, bahkan masih memanfaatkan laptop pribadi pegawai. Meskipun ada keterbatasan perangkat, jaringan internet diklaim berfungsi dengan baik tanpa kendala berarti. Kesimpulannya, infrastruktur teknologi belum sepenuhnya memadai, sehingga perluasan ketersediaan perangkat sangat dibutuhkan.

Dokumen dan Informasi, Sekretariat DPRD Kabupaten Garut telah menggunakan beberapa aplikasi digital seperti SIDIA dan SINTA. Informasi persidangan yang penting juga sudah diunggah dan dapat diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sistem ini mempermudah akses dan penyebarluasan produk hukum daerah, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan masyarakat mengakses informasi publik tanpa harus datang ke kantor. Walaupun pengelolaan dokumen fisik masih diperlukan sebagai bukti resmi, langkah digitalisasi ini telah mengurangi penggunaan kertas. Kendala utama dalam pengelolaan dokumen dan informasi digital ini adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola data serta kebutuhan akan pelatihan yang lebih intensif.

Mengenai Manfaat E-Government, manfaatnya sangat dirasakan, selaras dengan pandangan Indrajit (2004) tentang peningkatan efisiensi dan transparansi. Bagi anggota dewan, e-government mempercepat penyampaian jadwal, distribusi undangan, dan akses terhadap dokumen rapat. Hal ini secara signifikan mempermudah akses informasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan legislatif. Bagi pegawai, digitalisasi administrasi persidangan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan penyelesaian tugas, serta mempermudah koordinasi internal. Meskipun demikian, masih terdapat catatan bahwa implementasi e-government belum merata di setiap bagian, khususnya di bagian hukum dan persidangan, sehingga perlu ditingkatkan dan dikembangkan Kembali.

Terakhir, Adaptasi Teknologi oleh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Garut berlangsung secara bertahap. Pegawai telah menunjukkan kemauan yang baik untuk belajar dan mencoba sistem digital baru. Namun, adaptasi ini masih menghadapi kendala, terutama dalam hal keterampilan teknis dan konsistensi penggunaan aplikasi sehari-hari, yang menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan adalah kunci keberhasilan penerapan e-government ini.

### Kategorisasi Data

Kategorisasi data merupakan kumpulan code-code yang telah dipaparkan peneliti pada proses coding. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memilah dan memilih data yang dibutuhkan dari hasil coding data penelitian. Tujuan dari adanya kategorisasi data adalah untuk memudahkan peneliti dalam menjawab rumusan masalah berdasarkan data yang relevan. Kategorisasi data merupakan kumpulan dari code-code yang relevan berdasarkan hasil studi observasi, studi lapangan, jurnal, artikel, dan *website*.

**Tabel 1.** Kategorisasi Data

No	Kategori Data	Coding									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tema Kapasitas SDM											
1	Dukungan pimpinan	Pimpinan	Kewajiban	Mendukung	Industri 5.0	Digital	Memudahkan	Meningkatkan			
2	Kebijakan SOP	Belum ada Sop	Tahap	Persidangan	Persidangan	Bentuk Fisik	manual				
3	Sarana dan prasarana	Teknologi informasi	Aplikasi	Program-program	Pemerintahan	Perangkat lunak	Perangkat keras	Pemeliharaan sistem	Perencanaan	Realisasi	
4	Kualitas Pegawai	Pelatihan	Melaksanakan	Untuk orang	2 Suncang	Bimtek	Aplikasi administrasi	Dokumen Elektronik			
			Nakal				Asisten				
			Pelatihan				Persidangan				

5.	Literasi Digital Pegawai	Pentingnya inovasi	Sumber belajar daring	Eksperimen penggunaan sistem	Peningkatan kemampuan adaptif	Keberlanjutan pengetahuan digital	Integrasi kemampuan digital	Pemahaman teknologi dasar	Kemandirian pembelajaran	
6.	Lingkungan Kerja Digital	Sistem pendamping kerja	Budaya kerja inovatif	Penyediaan perangkat pelatihan	Ruang digital kolaboratif	Sumber daya internal	Kinerja digital	Evaluasi berbasis teknologi	Kebijakan pembinaan kompetensi	
Tema Transformasi Digital										
1	Digital persidangan	Lebih cepat	Peningkatannya	Cepat di Akses	Cepat Dan Efisien	Work From Home	Kebutuhan zaman	Memper Mudah Kinerja Dewan	Menyediakan Berkas	Pelayanan Administrasi
2	Kondisi Infrastruktur	Komputer	Laptop	Jaringan Internet	Wifi	Fasilitas	Penggunaan kapasitasnya terbatas	Efektif dan efisien		
3	Dokumen Dan Informasi	Informatik	Adaptable	JDIH	Diakses Secara Digital	Diakses Masyarakat	Terbuka Untuk Umum	Dokumentasi Product-product		
4	Manfaat e-governme nt	Efisiensi Biaya	Memerlukan Dampak Positif	Peningkatan Akuntabilitas	Penggunaan Sistem	Mengurangi Beban Administrasi				

---

5.	Adaptasi Teknologi	Penyesuaian pola kerja	Integrasi sistem internal	Evaluasi penerapan sistem	Resistensi terhadap perubahan	Pergeseran budaya organisasi	Peningkatan literasi digital	Platform daring	Pendampingan transformasi
----	--------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

---

### **Hambatan dari E-Government Pelayanan Administrasi Persidangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut**

Hambatan utama dalam mencapai E-Government Pelayanan Administrasi Persidangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut terbagi menjadi dua fokus, yaitu Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi. Dari sisi SDM, tantangannya adalah tingkat adaptasi teknologi yang masih rendah karena sebagian besar pegawai berada di kelompok usia menengah hingga senior, diperparah oleh keterbatasan program pelatihan yang berkelanjutan, yang berdampak pada pemanfaatan sistem e-government yang belum optimal, khususnya dalam penginputan dan pengelolaan data. Dari sisi infrastruktur, hambatan meliputi ketidakcukupan dan ketidakstabilan fasilitas dasar seperti komputer dan jaringan internet di beberapa unit kerja, serta masalah utama pada sistem yang belum terintegrasi sepenuhnya, yang mengakibatkan adanya proses input data ganda dan mengurangi efisiensi pelayanan administrasi persidangan.

### **Usaha untuk Menyelesaikan Hambatan dari E-Government Pelayanan Administrasi Persidangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut**

Upaya utama yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi E-Government Pelayanan Administrasi Persidangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut mencakup tiga fokus utama. Pertama, Pengembangan Sistem Digital Persidangan dilakukan dengan menciptakan aplikasi berbasis elektronik untuk digitalisasi seluruh proses administrasi seperti penjadwalan, undangan, notulen, dan dokumentasi, yang bertujuan untuk mempercepat distribusi informasi, memudahkan koordinasi, dan mengurangi penggunaan kertas. Kedua, Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi melalui pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras yang memadai (komputer, server, jaringan) dan peningkatan kualitas internet, sekaligus mengembangkan aplikasi administrasi persidangan yang terintegrasi antarbagian untuk menghindari input data ganda. Ketiga, Penyempurnaan Regulasi dan Prosedur dengan menyusun SOP berbasis elektronik untuk setiap tahapan administrasi agar proses menjadi lebih jelas, cepat, dan

transparan, serta mengajukan kebijakan internal yang menjadi dasar hukum kuat bagi penggunaan sistem e-government. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini, didukung oleh peningkatan kapasitas SDM dan perubahan budaya kerja, diharapkan mampu menjadikan penerapan E-Government lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

### **Simpulan**

Hasil penelitian mendalam yang menghasilkan dua tema besar, yaitu Kapasitas SDM dan Transformasi Digital, menunjukkan bahwa implementasi E-Government di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut belum optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala. Dalam tema Kapasitas SDM, meskipun Dukungan Pimpinan sudah penuh, pelaksanaannya masih kurang maksimal, dan Kebijakan SOP khusus untuk digitalisasi di Bagian Hukum dan Persidangan masih absen. Pengelolaan E-Government yang sudah cukup baik dengan adanya berbagai aplikasi pendukung, saat ini masih dalam tahap pengembangan dan belum maksimal. Selain itu, Kualitas Pegawai memerlukan peningkatan melalui pelatihan khusus karena masih ada pegawai yang belum menguasai teknologi. Sementara itu, dalam tema Transformasi Digital, Digital Persidangan masih belum maksimal karena kebutuhan akan bukti fisik dan banyaknya persiapan rapat yang masih dilakukan secara manual, meskipun sudah didukung layanan digital seperti SINTA (Sistem Informasi Rapat Kerja). Kondisi Infrastruktur sudah cukup baik dengan adanya fasilitas baru seperti layar videotron di ruang paripurna, namun masih terdapat kekurangan komputer di meja-meja pegawai. Di sisi positif, Dokumen dan Informasi Layanan Persidangan sudah cukup transparan melalui aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang memuat produk-produk rapat. Secara keseluruhan, Manfaat E-Government sangat terasa dalam mempermudah pekerjaan anggota dewan dan pegawai, namun perlu upaya peningkatan berkelanjutan untuk mengatasi kendala yang ada.

### **Saran**

Secara umum, implementasi E-Government dalam Pelayanan Administrasi Persidangan di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut perlu dioptimalkan, di mana belum optimalnya sistem digital secara menyeluruh menjadi permasalahan utama. Untuk mencapai implementasi yang optimal, disarankan agar Sekretariat DPRD memprioritaskan penguatan infrastruktur fisik dan pengembangan sistem digital terintegrasi guna menciptakan alur administrasi yang efisien dan mendukung budaya kerja kolaboratif; selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja sistem dan kepuasan pengguna sebagai dasar untuk inovasi dan menjamin kualitas pelayanan publik yang optimal.

### Daftar Pustaka

- Andianto. (2004). E-Government. Andi Offset.
- Bank Dunia. (t.t.). E-Government: The World Bank Definition. Diambil dari kutipan yang ada.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (2019). The Public Administration Dictionary. Dikutip dalam Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik.
- Dewi, I. C. (2011). Pengantar Administrasi. Pustaka Setia.
- Diskominfo Badung. (2017). Pedoman Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.
- Dwight, W. (2012). The Study of Public Administration. Dikutip dalam Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik.
- Dwiyanto, A. (2022). Inovasi Pelayanan Publik dan E-Government. Gadjah Mada University Press.
- Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro. (1970). Modern Public Administration. Dikutip dalam Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik.
- Herlambang, A., Saputra, A., & Fadhlurrahman, M. (2019). Evaluasi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan e-government di Kota Batu
- Indrajit, R. E. (2002). E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Elex Media Komputindo.
- Indrajit, R. E. (2005). E-Government in Action. Elex Media Komputindo.
- Indrajit, R. E. (2006). Electronic Government "Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi".
- Indrajit, R. E. (2006). Kajian Strategis E-Government. Elex Media Komputindo.
- Instruksi Presiden (INPRES) No 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan E-government.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. (Inpres No. 3, 2003).
- Kennedy, R., Surya, D., & Wartoyo, W. (2024). Tantangan dan solusi penerapan e-government di Indonesia
- Mariani, M. (2017). Administrasi Publik. Deepublish.
- Nigro, F. A., & Nigro, L. L. G. (2017). Modern Public Administration. Dikutip dalam Mariani, M. (2017). Administrasi Publik.
- Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Perbup No 194 Tahun 2023 SOTK Kabupaten Garut Pasca PB
- Perbup No 244 Tahun 2021 Tentang Tusi Dewan

- Polri. (2012). *Polri dan Aplikasi E-Government*. Penerbit Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Rachmatullah, A., & Purwani, D. (2024). Analisis pentingnya digitalisasi & infrastruktur teknologi informasi dalam institusi pemerintahan: E-government. *Jurnal Ilmu Komputer UMRI*
- Rahyaputra, A. (2021). Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 110-125.
- Rosenbloom, D. H. (2005). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. Dikutip dalam Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*.
- Shkarlet, S., Kholiavko, N., Dligach, V., Kholiavko, N., & Sytnyk, O. (2020). E-Government Development in Terms of Capacity Gap of Human Resources. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 17, 305-316.
- Siagian, S. P. (2004). *Filsafat Administrasi*. Dikutip dalam Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*.
- Sugiyono. (2020) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulaiman, A., Maysarah, F., & Wulandari, N. (2022). Penerapan e-government dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan di DPMPTSP Karimun
- Sundari, R., & Sartika, S. (2024). Advancing public service quality through Indonesia's electronic-based government system. *Esaprom Journal*, 6(2),
- Wijaya, H. (2021). Governance dalam implementasi e-government di Indonesia. *Jurnal Politik Walisongo (JPW)*